

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 13
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 20 September 2021
Waktu : 10.52 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas Penyesuaian RKA K/L Tahun 2022 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Harvick Hasnul Qolbi (Kuasa Menteri Pertanian/Wakil Menteri Pertanian);
 2. Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);
 3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
 4. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
 5. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
 6. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
 7. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*;
 8. Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
 9. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) hadir secara virtual;
 10. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero) hadir secara virtual; dan

11. Harry Warganegara, Direktur Utama PT Berdikari (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas Penyesuaian RKA K/L Tahun 2022 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dibuka pukul 10.52 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp14.451.749.428.000,00** (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- j. **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp445.996.136.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- k. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.007.159.703.000,00 (satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA K/L Kementerian Pertanian Tahun 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

- 2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rincian program dan anggaran fokus kepada kegiatan peningkatan produksi dan pendapatan petani antara lain kegiatan pada:
 - a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diantaranya untuk meningkatkan produksi gabah, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, serta alat mesin pascapanen;
 - b. Direktorat Jenderal Hortikultura diantaranya untuk meningkatkan produksi tanaman sayuran, cabai, pisang, bawang merah, bawang putih, jahe, dan alpukat;
 - c. Direktorat Jenderal Perkebunan diantaranya untuk mengembangkan kelapa dan pala, meningkatkan mutu produksi karet alam, serta pasca panen dan pengolahan;

- d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya untuk meningkatkan produksi ternak, antara lain unggas, sapi dan domba;
 - e. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diantaranya melalui peningkatan volume irigasi tersier, Jalan Usaha Tani, UPPO, alat dan mesin prapanen;
 - f. Kegiatan pendukung untuk peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis/bimtek; dan
 - g. Kegiatan inovasi teknologi, riset, dan pengembangan inovatif kolaboratif, melalui kegiatan bimbingan teknis, dan perbenihan.
3. Komisi IV DPR RI mendukung usulan Kementerian Pertanian terkait perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian menjadi Badan Standarisasi dan Sistem Pertanian (BSSP) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selanjutnya meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM), aset, program/kegiatan, dan anggaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan-kegiatan teknis yang berada di Badan Ketahanan Pangan, seperti Pekarangan Pangan Lestari untuk diintegrasikan pada Direktorat Jenderal teknis yang relevan sehubungan dengan meleburnya Badan Ketahanan Pangan merujuk pada terbentuknya Badan Pangan Nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB.

Kuasa Menteri Pertanian
Wakil Menteri Pertanian,

Ttd.

Harvick Hasnul Qolbi

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151